ANALISIS TERBENTUKNYA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Aulia Rahmawati

115020107111057

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS TERBENTUKNYA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Yang disusun oleh :

Nama	:	Aulia Rahmawati
NIM	:	115020107111057
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 03 Juni 2015

Malang, 03 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo, SE., MS

NIP. 19601030 198601 1 001

Analisis Terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebelum Dan Setelah Reformasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang

Aulia Rahmawati, Dr. Susilo, SE.MS.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya[#]
Email: auliarhmwt6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: Faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Malang sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah. (2) Terjadinya perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintahan Kabupaten Malang pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif setelah itu data diestimasi menggunakan metode OLS dengan menggunakan variabel dummy Reformasi Keuangan Daerah, dimana 0 = sebelum Reformasi Keuangan Daerah dan 1 = setelah Reformasi Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas, Utang dan Investasi Daerah serta Reformasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hasil lain dari penelitian ini merujuk kepada persamaan model dimana persamaan ini menunjukkan hasil Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas serta Utang dan Investasi Daerah memiliki hubungan positif dengan terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga aspek tersebut berpengaruh terhadap terbentuknya SiLPA lebih tinggi pada saat setelah Reformasi Keuangan Daerah dibandingkan sebelum Reformasi Keuangan Daerah atas adanya perubahan kebijakan desntralisasi fiskal pada saat Reformasi.

Kata Kunci: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, SiLPA, APBD, Reformasi Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal.

A. PENDAHULUAN

Pada masa orde lama Pemerintah Pusat lebih diutamakan daripada Pemerintah Daerah, sehingga menimbulkan rasa kecewa daerah-daerah dan terjadinya pemberontakan seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan saat Pemerintah Orde Baru, rasa kecewa yang dirasakan oleh daerah terhadap pusat tetap berlanjut. Hingga pada tahun 1996 terjadi peristiwa luar biasa yang menyerang keadaan ekonomi Indonesia yaitu adanya krisis ekonomi dan mencapai puncaknya pada tahun 1997. Sehingga dari adanya krisis ekonomi tersebut mendorong keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Majelis Permusyawaratan Pemerintah sebagai wakil rakyat menjawab mengeluarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai penyelengaraan Otonomi Daerah, Peraturan dan Pemanfaatan Sumber Daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Dari ketetapan MPR tersebut terdapat kebijakan Otonomi Daerah berupa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta adanya desentralisasi fiskal yang mengatur mengenai kewenangan daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki daerah otonom dalam menjalankan kewajiban daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Lebih lanjut peraturan tersebut menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran dengan baik, apalagi mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sangat terbatas. Karena tugas utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban atas dana APBD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka setiap Kepala Daerah harus membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini menjelaskan bagaimana dana APBD digunakan oleh daerahnya dan dalam pelaporannya harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang jelas. Dasar hukum pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003. Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Hampir diseluruh pemerintah Daerah di Indonesia memliki SiLPA. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. SiLPA yang ada di semua pemerintah daerah dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya pelampauan Pendapatan Daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran. Serta adanya efisiensi belanja pemerintah yang terlalu jauh dari target yang ditetapkan. Besaran SiLPA yang dihasilkan oleh pada suatu daerah tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya SiLPA belum serta merta menunjukkan baiknya kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Peningkatan SiLPA yang semakin tinggi dari tahun ke tahun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sengaja, karena semakin tinggi SiLPA maka Pemerintah Daerah termotivasi untuk melakukan investasi di Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Jatim agar mendapat bunga guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menilai apakah SiLPA menunjukkan kinerja yang baik atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul "Analisis Terbentuknya Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebelum dan Setelah Reformasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang". Sehingga, pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas serta Utang dan Investasi Daerah terhadap terbentuknya SiLPA?
2. Apakah terjadi perbedaan terbentuknya SiLPA pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah?

B. KAJIAN PUSTAKA

Hubungan Persamaan Ekonomi terhadap Keuangan Negara dan Daerah

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya begitu juga dengan APBD. Berdasarkan pos-pos dalam APBN, maka pengaruh dari berbagai kebijaksanaan fiskal terhadap situasi makro dapat diuraikan dengan leih seksama, khususnya terhadap permintaan agregat (Z), tingkat harga (P) dan tingkat output (Q).

A. Pembelian Barang Jasa

Pertama kita lihat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (G) pada sisi pengeluaran APBN. Definisi dari G telah diuraikan bahwa G merupakan salah satu unsur dari permintaan agregat (Z). dalam perekonomian tertutup **Z = C + I + G.**

Kita ingat pula bahwa perubahan G menimbulkan perubahan pada Z melalui proses pelipat (income multiplier). Selanjutnya, perubahan Z akan menggeser kurva Z dan akan menentukan P dan Q yang baru. Selanjutnya, P dan Q yang baru ini akan mempengaruhi permintaan akan uang L (karena L ditentukan oleh tingkat bunga r, P dan Q). Selanjutnya perubahan tersebut akan mengubah tingkat bunga r dan ini akan mengubah I (=ΔI). Perubahan I ini melalui proses pelipat, menggeser Z dan selanjutnya mengubah P dan Q kemudian L, r dan I dan seterusnya. Dan proses terus berlangsung sampai akhirnya semua variable tersebut mencapai posisi keseimbangannya secara bersama – sama. Ini adalah posisi keseimbangan umum yang baru (posisi keseimbangan umum yang lama bergeser ke posisi keseimbangan yang baru, dan ini adalah akibat akhir dari ΔG tadi).

B. Gaji Pegawai

Gaji pegawai pemerintah (W). dari definisi mengenai Z jelas bahwa W bukan komponen dari Z. Hanya pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (yang diproduksi dalam tahun yang bersangkutan) yang merupakan komponen langsung dari Z. Perubahan W akhirnya akan mempengaruhi Z secara tidak langsung. Perubahan W misalnya kenaikan gaji pegawai negeri mempunyai akibat langsung berupa kenaikan disposable income (Yd) yang diterima oleh sektor rumah tangga. Kenaikan Y kemudian meningkatkan Z melalui kenaikan pengeluaran konsumsi (ΔC). Selanjutnya melalui proses multiplier ΔC akan meningkatkan .

C. Transfer Payment

Transfer payment (R) adalah juga bukan pembelian barang / jasa oleh pemerintah di pasar barang. Transfer payment mencatat pembayaran (atau pemberian) pemerintah langsung kepada warganya. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status yang sama dengan gaji pegawai, meskipun jelas secara administratif keduanya berbeda. Perhatikan bahwa multipilier transfer payments adalah persis sama dengan multiplier gaji pegawai. Proses selanjutnya dengan adanya ΔZ adalah proses berputar ke arah keseimbangan umum yang menyangkut pasar uang.

D. Penerimaan Pajak

Sisi penerimaan dari APBN lebih banyak menyangkut pasar uang (kecuali mungkin pos penerimaan yang pertama yaitu pajak). Penerimaan pajak (T) bukan komponen dari permintaan agregat (Z). Penurunan Z sebesar ini kemudian mempunyai akibat berantau (melalui proses keseimbangan umum) terhadap perekonomian. Jadi pengaruh ΔT terhadap perekonomian melalui proses yang sama dengan ΔW dan ΔR, hanya saja dengan tanda yang berkebalikan. Secara analitis T memang bisa dipandang sebagi transfer payments negative.

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari keseluruhan jenis desentralisasi. Ini dapat dipahami karena dari perspektif sebuah organisasi, fiskal yang berarti keuangan merupakan darahnya organisasi. Adalah menjadi terkesan tidak terjadi desentralisasi jika tugas pelayanan publik dilimpahkan wewenangnya, tetapi wewenang keuangan tidak dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Pusat untuk memberikan hak dan pemberdayaan Pemerintah Daerah guna melaksanakan pengelolaan potensi Daerah yang dapat secara langsung memberikan dampak kepada rakyat

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan subsistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; semuanya ini menjadikan dasar untuk mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparansi dan akuntabel.

Sedangkan otonomi di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah. Dengan demikian otonomi bagi setiap Daerah yang bertanggungjawab adalah benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Kebijakan Daerah merupakan kunci sukses bagi Daerah Otonom untuk mewujudkan kewajibannya, serta kunci sukses bagi Daerah untuk memperluas potensi dan merealisasikan potensi pembangunan yang ada di Daerah yang dengan memperhatikan ketersediaaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, keberfungsian kelompok-kelompok masyarakat peduli, serta faktor-faktor lain yang dapat mewujudkan kemampuan Daerah untuk memenuhi kewajibannya.

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum Reformasi

Sejak Repelita I tahun 1967 dengan Repelita IV Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya yaitu pada tahun 1968. Bentuk dan susunan APBD yang ada sama dengan bentuk dan susunan APBN hanya saja sebutan pos-pos pendapatan dan belanja berbeda

Pengelolaan Keuangan Daerah Setelah Reformasi

Paradigma baru masyarakat modern mendorong reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti digambarkan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Alur Reformasi Keuangan Daerah
Sebuah Paradigma Baru dan Perjalanan Reformasi keuangan Daerah

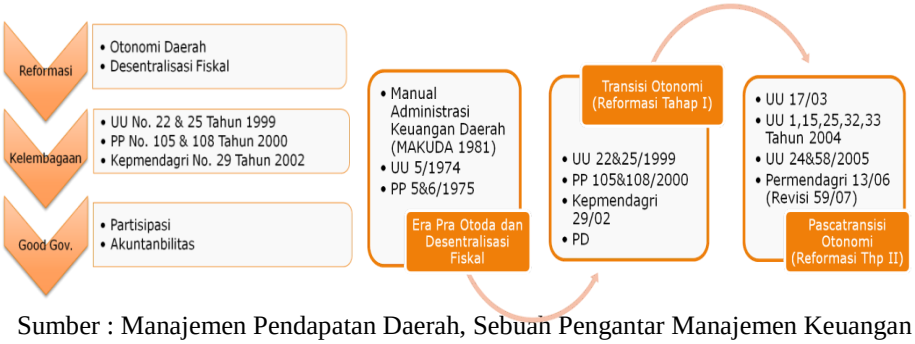

Sumber : Manajemen Pendapatan Daerah, Sebuah Pengantar Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi, 2011

Aspek utama reformasi manajemen keuangan daerah adalah perubahan sistem anggaran (top down menjadi bottom up) dan dari tradisional menjadi berbasis kinerja serta mengenal adanya sisa anggaran), perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah (sentralisasi menjadi desentralisasi), perubahan sistem akuntansi keuangan daerah (single entry menjadi double entry dan basis kas menuju ke akrual melalui cara basis kas yang dimodifikasi). Keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah tersebut kemudian dilaksanakan oleh dua komponen yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap

pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni:

1. Untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran). Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum habis dengan terlebih dahulu menetapkan DPA-L (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan) pada akhir tahun sebelumnya
2. Membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu).

Sumber atau cakupan SiLPA tahun anggaran tertentu dapat dikelompokkan ke dalam SiLPA Aktif dan SiLPA Pasif. SiLPA Aktif terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA Aktif diartikan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang sudah jelas peruntukkannya atau pemanfaatannya dan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. SiLPA Aktif diartikan juga sebagai anggaran "bertuan yang ada pemiliknya".

Sedangkan SiLPA Pasif terdiri dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan penghematan belanja. SiLPA Pasif saya artikan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang belum jelas peruntukkannya atau pemanfaatannya. SiLPA Pasif dapat diartikan sebagai anggaran "tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya".

C. MODEL PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Metode pengeumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode-metode dapat diartikan dengan meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data menggunakan uji statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Lebih jauh lagi penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta berupa pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena dengan interpretasi yang tepat. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data yang ada, baik buku literatur maupun dari sumber-sumber lain. Data sekunder tersebut dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Malang tahun 1990 sampai dengan tahun 2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan

masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan *download internet.*

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yang akan dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dalam angka. Maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan spesifikasi model sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + D1 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = SiLPA

X1 = Pendapatan Daerah

X2 = Belanja Daerah

X3 = Kas dan Anggaran Kas Daerah

X4 = Utang dan Investasi Daerah

D1 = Variabel Dummy

(0 = Sebelum Reformasi Keuangan Daerah)

(1= setelah Reformasi Keuangan Daerah)

Uji Estimasi Data

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan variabel bebas terhadap variabl terikat. Ketika nilai R^2 adalah mendekati 1 maka terdapat hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dengan variabel bebasnya dan hasil tersebut dianggap hasil penelitian yang baik

1. Uji Simultan (Uji F)
   Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan secara statistik terhadap variabel dependennya. Kriteria ($\alpha = 0{,}05$):
   Jika Sig. > α, maka Ho diterima
   Jika Sig. < α, maka Ha ditolak

2. Uji Parsial (Uji T)
   Untuk melihat adanya pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (parsial) terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lainnya sementara dianggap konstan maka dapat digunakan uji t. Kriteria ($\alpha = 0{,}05$):
   Jika Sig. > α, maka Ho diterima
   Jika Sig. < α, maka Ha ditolak

3. Uji Asumsi Klasik

   a. Uji Autokerelasi
      Autokorelasi merupakan keadaan dimana terdapat korelasi antara variabel gangguan pada periode tertentu dengan variabel pada periode lain dengan kata lain dalam penelitian tersebut variabel gangguannya adalah tidak random. Dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan autokorelasi yang terjadi dalam model regresi akan dilihat dengan uji Durbin-Watson.

   b. Uji Multikolinearitas
      Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara tiap variabel bebas terdapat hubungan secara linier dalam persamaan regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk menguji adanya multikolinearitas akan dilakukan dengan

membandingkan nilai R^2 hasil regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi antar variabel bebasnya.

c. Uji Heteroskedastisitas
uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah didalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila dalam variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua hasil observasi. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah melalui uji Glejser yakni dengan melakukan regresi antara residual absolute ($|U_1|$) dengan semua variabel bebasnya didalam penelitian. Jika nilai probabilitas hasil regresi antara $|U_1|$ dengan tiap-tiap variabel bebas adalah lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap residual kuadratnya.

d. Uji Normalitas
Jika dalam model terindikasi adanya normalitas, maka dalam model nilai distribusi residual/gangguan dari hasil estimasi terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini digunakan metode non parametrik kolmograf-smirnov. Dengan ketentuan jika nilai Asymp.sig dari model regresi adalah < 0,1 maka dalam model tersebut memiliki residual yang terdistribusi secara tidak normal. Demikian sebaliknya

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini meliputi pola pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Malang dan hubungan pendapatan, belanja, kas dan anggaran kas serta Utang dan Investasi terhadap terbentuknya SiLPA. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1:**Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah /APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD**

Sumber : RPJMD Kabupaten Malang, 2015

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan Keuangan Daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2 : Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

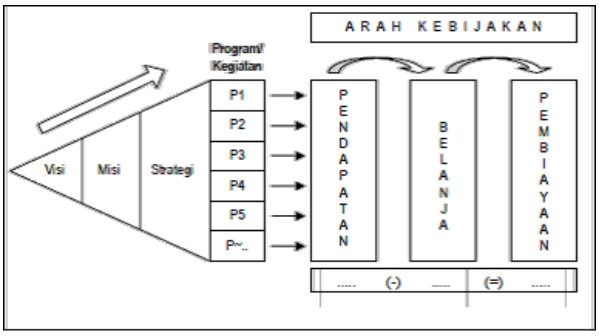

Sumber : RPJMD Kabupaten Malang

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Malang, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Pendapatan daerah Kabupaten Malang mengalami perbedaan antara sebelum Reformasi Keuangan Daerah dengan setelah Reformasi Keuangan Daerah.

Gambar 4.3 : Perkembangan Pendapatan Daerah Sebelum Reformasi

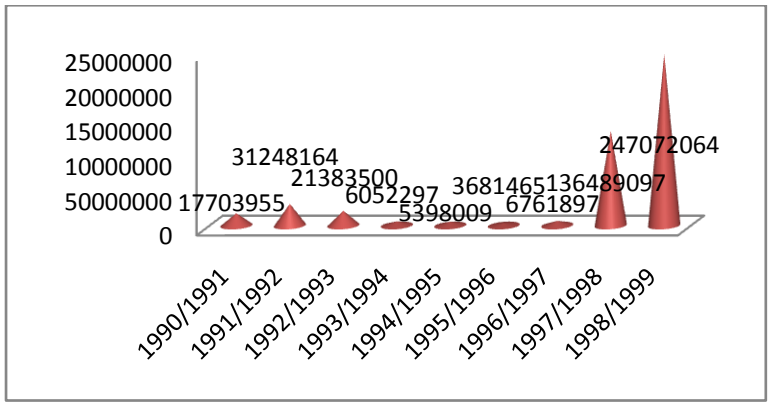

Sumber : Data Primer (Diolah)

Gambar 4.4: **Perkembangan Pendapatan Daerah Setelah Reformasi**

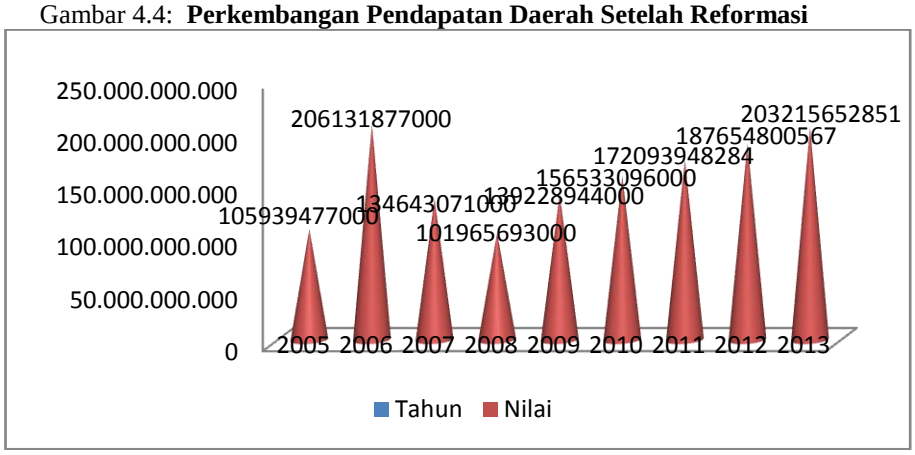

Sumber : Data Primer (Diolah)

Belanja daerah mengalami perbedaan antara sebelum Reformasi Keuangan Daerah dengan setelah Reformasi Keuangan Daerah.

Gambar 4.5 : **Perkembangan Belanja Daerah Sebelum Reformasi**

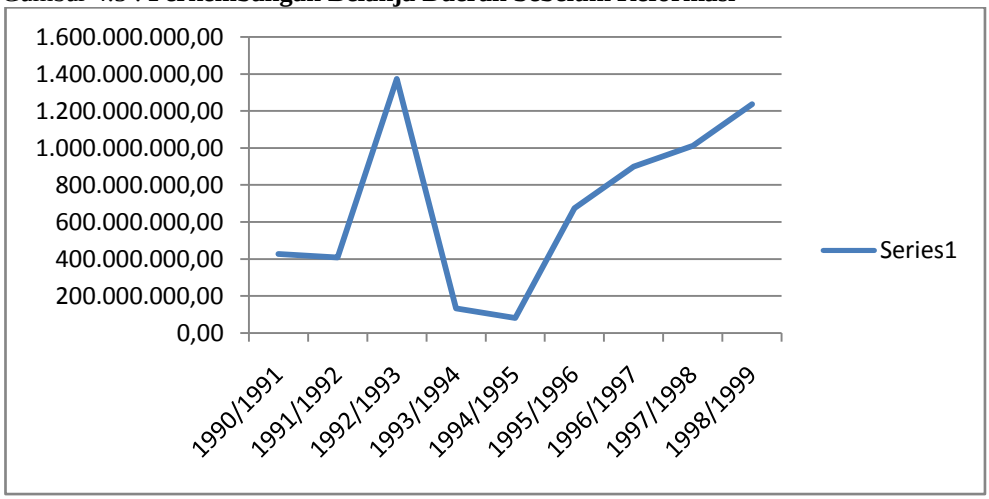

Sumber : Data Primer (Diolah)

Gambar 4.6 : **Perkembangan Belanja Daerah Setelah Reformasi**

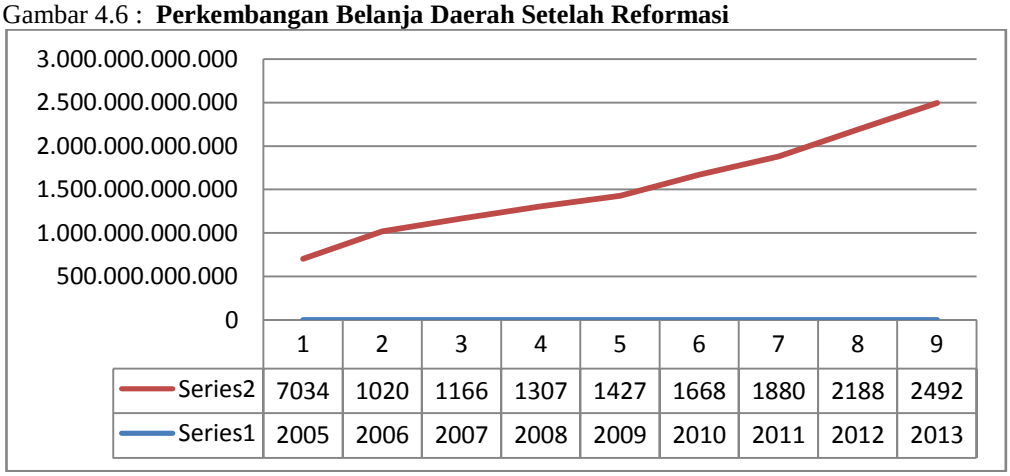

Sumber : Data Primer (Diolah)

Kas dan anggaran kas daerah Kabupaten Malang mengalami perbedaan antara sebelum Reformasi Keuangan Daerah dengan setelah Reformasi Keuangan Daerah.

Gambar 4.7 : **Perkembangan Kas dan Anggaran Kas Sebelum Reformasi**

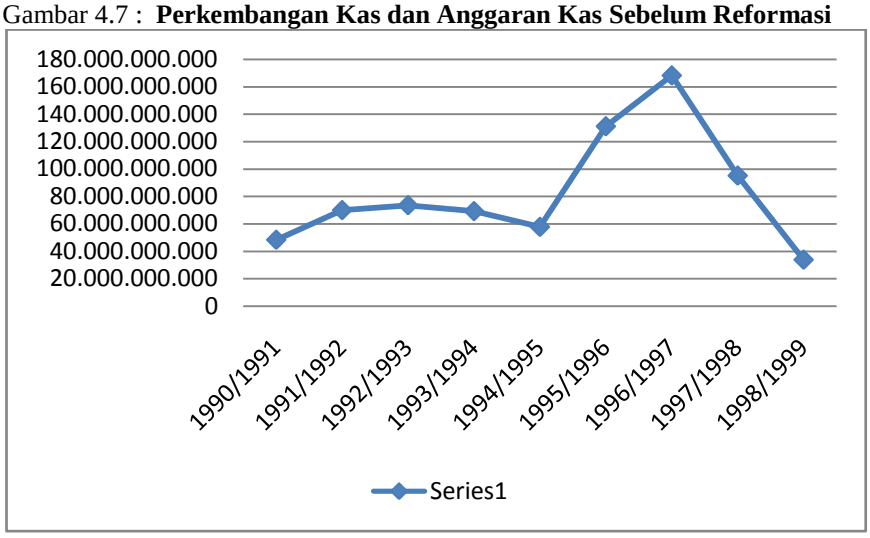

Sumber : Data Primer (diolah)

Gambar 4.8 : **Perkembangan Kas dan Anggaran Kas Setelah Reformasi**

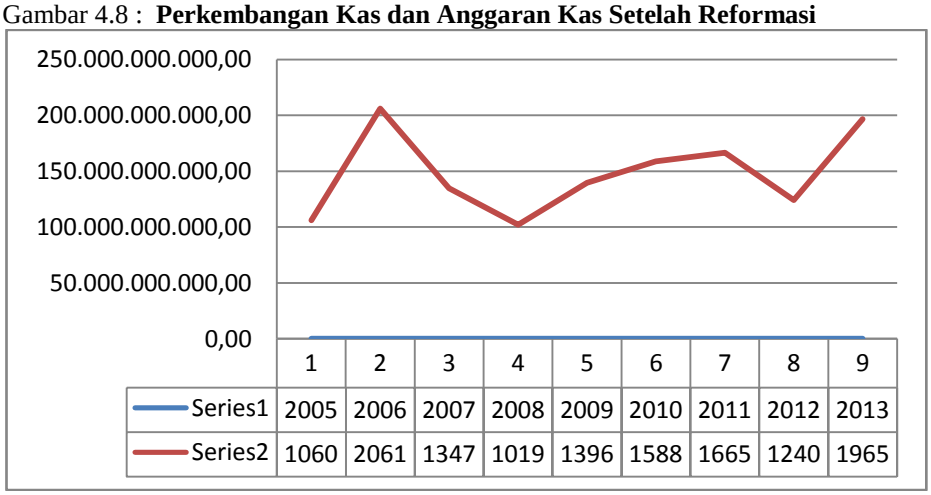

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Series1	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Series2	1060	2061	1347	1019	1396	1588	1665	1240	1965

Sumber : Data Primer (Diolah)

Utang dan investasi daerah Kabupaten Malang mengalami perbedaan antara sebelum Reformasi Keuangan Daerah dengan setelah Reformasi Keuangan Daerah.

Gambar 4.9 : **Perkembangan Utang dan Investasi Sebelum Reformasi**

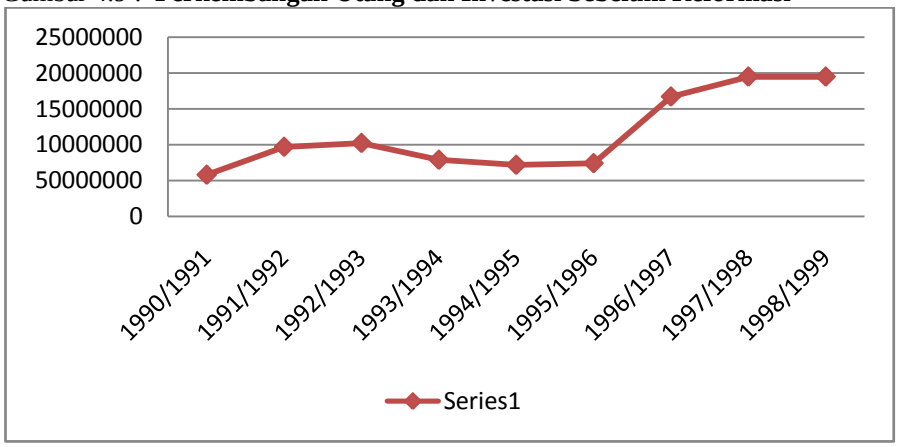

Sumber : Data Primer (diolah)

Gambar 4.10 : **Perkembangan Utang dan Investasi Setelah Reformasi**

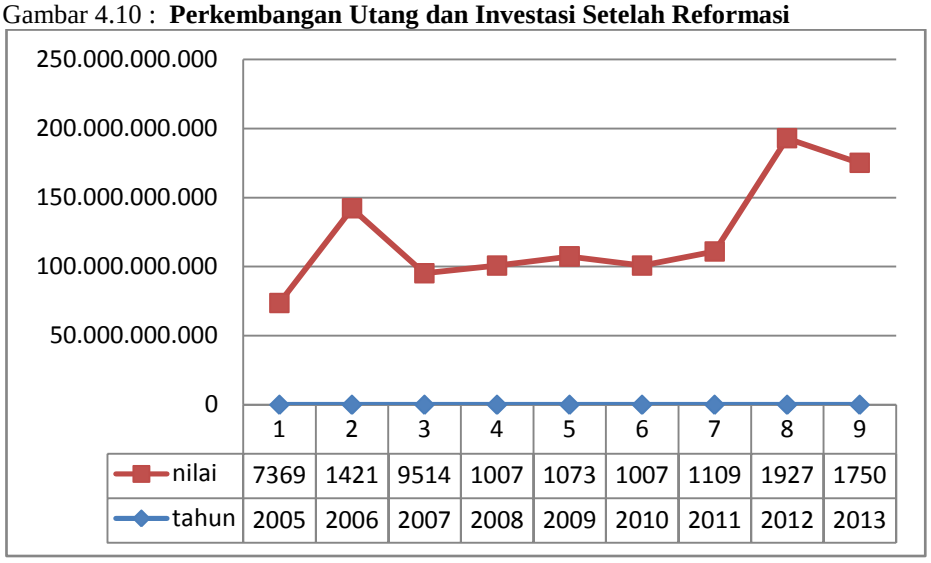

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nilai	7369	1421	9514	1007	1073	1007	1109	1927	1750
tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

Sumber : Data Primer (Diolah)

Hasil Regresi Berganda

Beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan analisis regresi berganda diantaranya yaitu sebagai berikut

Uji Asumsi Klasik

1. **Uji Heteroskedastisitas**

   Uji Heteroskedastisitas ini untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual. Hasil uji terhadap residual pada penelitian ini terdapat pada gambar 4.11 dibawah ini:

   Gambar 4.11: **Uji Asumsi Heteroskedastisitas**

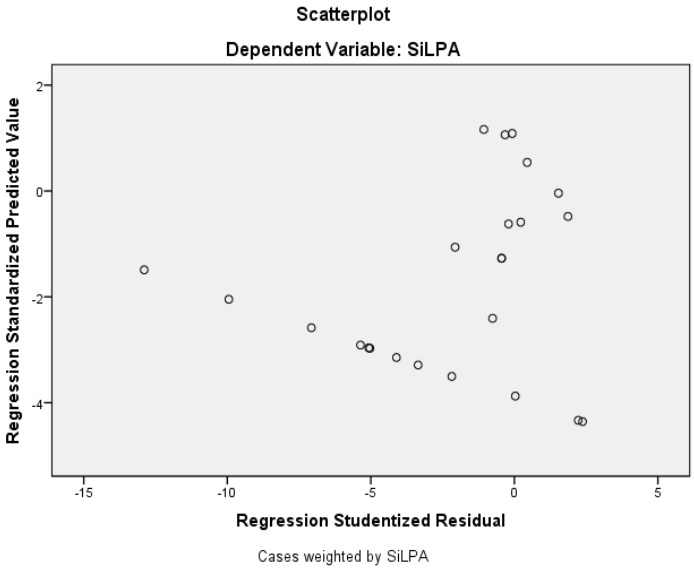

Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan hasil scatterplot pada Gambar 4.11, bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar titik 0 pada sumbu Y sehingga disimpulkan tidak terjadi sehingga tidak terdapat Heteroskedastisitas

2. **Uji Normalitas**

   H0 : Sebaran data berdistribusi normal

   Ha : Sebaran data tidak berdistribusi normal

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Sebaran data pada penelitian ini dapat dilihat berdasarkan gambar 4.11 berikut ini:

Gambar 4.1 **Uji Normalitas**

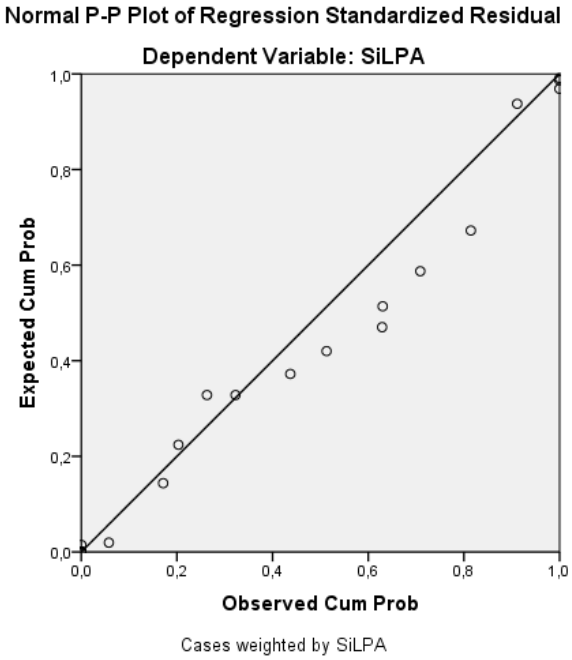

Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan kurva di atas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang terdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 **Uji Multikolinearitas**

Coefficients[a]

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,000		
	Pendapatan Daerah (X1)	,000	,216	6,484
	Belanja Daerah (X2)	,000	,205	5,830
	Kas Daerah (X3)	,000	,315	3,171
	Utang dan Investasi Daerah (X4)	,000	,429	2,331
	Reformasi Keuangan Daerah (D1)	,000	,974	1,027

Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF dari variabel X1, X2, X3, X4, D1 lebih kecil dari 10. Maka disimpulkan bahwa dalam pengujian asumsi ini tidak terjadi multikolineritas.

4. Menganalisis Uji Hasil Regresi

Pada penelitian ini hasil regresi menujukkan hubungan signifikansi antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk menunjukkan terjadinya perbendaan terbentuknya SiLPA berdasarkan variabel-variabel independennya terdapat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 **Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-38198	133729	
Pendapatan Daerah (X1)	,103	,000	-1,778
Belanja Daerah (X2)	,079	,000	1,539
Kas Daerah (X3)	,619	,000	,698
Utang dan Investasi Daerah (X4)	,691	,000	,661
Reformasi Keuangan Daerah (D1)	1,798	,000	,019

Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2, maka didapatkan model regresi seperti berikut ini:

$$\mathbf{Y = -38198 + 0{,}103X_1 + 0{,}79X_2 + 0{,}619X_3 + 1{,}798D_1 + \varepsilon}$$

di mana:

Y = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
X1 = Pendapatan Daerah
X2 = Belanja Daerah=
X3 = Kas dan Anggaran Kas Daerah
X4 = Utang dan Investasi Daerah
D1 = Variabel Dummy (0 = Sebelum Reformasi Keuangan Daerah, 1= Setelah Reformasi Keuangan Daerah

1. Variabel X1 yaitu Pendapatan Daerah memiliki nilai sebesar 0,103 dengan menunjukkan nilai positif. Berarti bahwa X1 memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat Setelah Reformasi Keuangan Daerah dibanding sebelum Reformasi Keuangan Daerah.
2. Variabel X2 yaitu Belanja Daerah memiliki nilai sebesar 0,79 dengan menujukkan nilai positif. Berarti bahwa X2 memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat Setelah Reformasi Keuangan Daerah dibanding sebelum Reformasi Keuangan Daerah.
3. Variabel X3 yaitu Kas dan Anggaran Kas Daerah Daerah memiliki nilai sebesar 0,619 dengan menujukkan nilai positif. Berari bahwa X3 memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat setelah Reformasi Keuangan daerah dibanding setelah Reformasi Keuangan Daerah.
4. Variabel X4 yaitu Utang dan Investasi Daerah memiliki nilai sebesar -0,691 dengan menujukkan nilai positif. Berarti bahwa X4 memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat Setelah Reformasi Keuangan Daerah dibanding sebelum Reformasi Keuangan Daerah.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square) untuk melihat bagaimana hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat menjelaskan model. Nilai R *square* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 **Koefisien Determinasi**

Model Summary[c]

R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics	
			R Square Change	F Change
,983[a]	,966	,966	,966	998906

Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.3, model regresi memiliki nilai koefisien determinasi (R Square) 0,966. Hal ini berarti bahwa model regresi yang didapat mampu menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel bebas X1, X2, X3, X4 dan D1 terhadap Y sebesar 97,0 % dan sisanya 3,0 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dteliti dalam persamaan ini.

6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dari model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t).

H_o: Diduga Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas Daerah, Utang dan Investasi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Terbentuknya SiLPA Pemerintahan Kabupaten Malang ($\alpha = 0{,}05$)

Ha: Diduga Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas Daerah, Utang dan Investasi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Terbentuknya SiLPA Pemerintahan Kabupaten Malang ($\alpha = 0{,}05$)

a. **Uji Model Regresi Secara Simultan**

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y secara bersama-sama

Tabel 4.4 **Uji F Tabel ANOVA**

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	3024640884	5	9989,060764	,000[b]

Sumber: Sumber: Database Hasil Penelitian, 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas pengujian hipotesis model regresi secara simultan menggunakan uji F. Diperoleh F Hitung sebesar 9989, 06 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel (1244,806 > 6,26) dan signifikansi kurang dari 0,05 sehingga H_o ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel X1, X2, X3, X4 dan D1 terhadap variabel Y.

b. Uji Model Regresi Secara Parsial

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau tidak.

Berikut hasil pengujian hipotesis dari variabel Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Kas dan Anggaran Kas serta Utang dan Investasi Daerah terhadap terbentuknya SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Malang pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 **Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Pendapatan Daerah	50501	0,000	Tolak H_o (Signifikan)
Belanja Daerah	45639	0,000	Tolak H_o (Signifikan)
Kas dan Anggaran Kas Daerah	28204	0,000	Tolak H_o (Signifikan)
Utang dan Investasi Daerah	31131	0,000	Tolak H_o (Signifikan)
Reformasi Keuangan Daerah	13380	0,000	Tolak H_o (Signifikan

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa:

1. Nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Daerah yaitu sebesar 0,000 < 0,05, dengan nilai t-hitung (50501) lebih besar dari t-tabel (2,57058) maka dapat menolak H_o.
2. Nilai signifikansi untuk variabel Belanja Daerah yaitu sebesar 0,000 < (0,05), dengan nilai t-hitung (45639) lebih besar dari t-tabel (2,57058) maka dapat menolak H_o.
3. Nilai signifikansi untuk variabel Kas dan Anggaran Kas Daerah yaitu sebesar 0,000 > 0,05, dengan nilai t-hitung (28204) lebih besar dari t-tabel (2,57058) maka dapat menolak H_o.
4. Nilai signifikansi untuk variabel Utang dan Investasi Daerah yaitu sebesar 0,000 < 0,05, dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (31131 > 2,57058) maka dapat menolak H_o.
5. Nilai signifikansi untuk variabel dummy Reformasi Keuangan Daerah yaitu sebesar 0,000 < 0,05, dengan nilai t-hitung (13380) lebih besar dari t-tabel (2,57058) maka dapat menolak H_o.

Hasil analisis menunjukkan terjadi perbedaan terbentuknya SiLPA pada Kabupaten Malang pada saat sebelum Reformasi Keuangan Daerah dengan setelah Reformasi Keuangan Daerah

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Terbentuknya SiLPA Kabupaten Malang Setelah Reformasi Keuangan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Malang berpengaruh terhadap SiLPA karena terjadinya pelampuan atas target pendapatan daerah serta adanya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang mendekati akhir tahun anggaran. Kedua hal ini memberikan sumbangan signifikan terbentuknya SiLPA. Pelampauan pendapatan daerah yang melebihi target anggaran dikarenakan dalam menyusun anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Daerah beracuan pada realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran sebelumya. Padahal terdapat potensi-potensi di daerah yang menjadi sumber pendapatan, sehingga realisasi pendapatan daerah mengalami pelampauan yang besar. Salah satu potensi sumber pedapatan daerah yaitu keuntungan atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi berupa bunga yang diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pendapatan kembali. Kekurang tepatan pengelolaan pendapatan daerah dan transfer ke daerah pada akhir tahun akan menyebabkan sisa dana APBD Kabupaten Malang tidak terserap dengan cukup besar. Penggunaan dana dari penyaluran transfer Pemerintah Pusat pada akhir tahun anggaran didasarkan pada asumsi bahwa adanya kenaikan pendapatan daerah, dari alokasi semula tidak akan dapat dialokasikan lagi kedalam belanja karena proses perubahan APBD tidak mungkin lagi dilakukan akibat keterbatasan waktu.

2. **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Terbentuknya SiLPA Kabupaten Malang Setelah Reformasi Keuangan Daerah**

Belanja daerah merupakan hal yang berhubungan dengan penggunaan dana pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum, sehingga pertanggungjawaban atas penggunaannya harus dilakukan dengan benar. Belanja daerah diarahkan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terformulasikan dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah Kabupaten malang lebih difokuskan pada belanja pembiayaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pemberian stimulan ataupun motivasi dalam rangka pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada organisasi kemayarakatan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi-misi dan kebijakan pembangunan daerah

Belanja daerah harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan SiLPA yang semakin meningkat. Pemerintah Daerah harus berupaya untuk menyerap anggaran belanja semaksimal mungkin. Penyerapan anggaran yang optimal memiliki pengelolaan atas belanja daerah yang baik dan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Hal ini penting karena belanja daerah meliputi belanja wajib dan belanja pilihan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja daerah maka SiLPA yang dihasilkan juga semakin kecil.

3. Pengaruh Kas dan Anggaran Kas Daerah Terhadap Terbentuknya SiLPA Kabupaten Malang Setelah Reformasi Keuangan Daerah

Kas merupakan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Kas daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan jumlah SiLPA, karena di dalam kas daerah terdapat idle cash atau dana menganggur yang merupakan akumulasi aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. terhadap besarnya SiLPA. Untuk mengetahui besaran kas dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah membuat anggaran kas guna menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu di waktu yang akan datang.

Terdapat 3aspek yang menyebabkan kas dan anggaran kas daerah berpengaruh terhadap terbentukya SILPA. Aspek pertama yaitu akumulasi kas dari aktivitas operasi, aliran kas masuk berupa pendapatan daerah dan aliran kas keluar berupa belanja daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengalami pelampauan pendapatan daerah dan diikuti dengan tingginya belanja daerah yang melebihi target akan menyebabkan sisa anggaran semakin kecil, sehingga kas bersih dari aktivitas ini bernilai kecil.

Aspek kedua yaitu akumulasi kas dari aktivitas investasi dimana aliran kas masuk berupa penjualan investasi dan penjualan aset serta aliran kas keluar berupa pembelian investasi. Hasil akumulasi kas dari aktivitas investasi akan mengurangi sisa anggaran yang berasal dari kas aktivitas operasi.

Aspek ketiga yaitu akumulasi kas dari aktivitas pembiayaan, untuk aliran kas masuk pada aktivitas ini berasal dari penerimaan pembiayaan dan aliran kas keluar keluar berupa pengeluaran pembiayaan. Dan hasil akumulasi kas dari aktifitas pembiayaan akan dikurangi dengan akumulasi kas dari aktifitas operasi dan investasi.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, akumulasi kas dari aktivitas operasi akan dikurangi dengan akumulasi kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan akan menghasilkan saldo akhir kas. Besarnya saldo akhir kas menggambarkan sisa anggaran

4. **Pengaruh Utang dan Investasi Daerah Terbentuknya SiLPA Kabupaten Malang Setelah Reformasi Keuangan Daerah**

Utang dan investasi daerah dapat mempengaruhi terbentuknya SiLPA karena utang dan investasi merupakan pembiayaan daerah. Utang adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Selain untuk menutupi defisit anggaran Pemerintah Daerah, utang juga digunakan untuk melakukan investasi daerah. Karena utang dapat menimbulkan sisa anggaran, maka pemanfaatan dari sisa anggaran digunakan untuk investasi daerah agar dapat mengurangi penerimaan pembiayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang meningkatkan investasi daerah baik ke Pemerintah Pusat melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau ke Pemerintah Daerah lain dalam bentuk investasi terhadap produk unggulan daerah lain seperti sektor pariwisata Kota Batu. Investasi daerah menjadi kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi karena setiap investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah memberikan manfaat ekonomi berupa pendapatan bunga. Dari manfaat tersebut Pemerintah Daerah meningkatkan belanja modal sehingga meningkatkan pengeluaran pembiayaan, semakin tinggi pembiayaan daerah maka sisa anggaran akan menjadi kecil.

Karena utang dan investasi daerah merupakan bagian penting dari bagian pembiayaan anggaran yang berguna untuk menutupi defisit fiskal (utang) ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran (investasi), keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus tetap dipertahankan. Sehingga pengelolaan utang dan investasi daerah yang baik dapat mempengaruhi terbentuknya SiLPA yang semakin menurun.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain :

1. Pendapatan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap terbentuknya SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Malang. Maka terjadi perbedaaan terbentuknya SiLPA pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah dimana Pendapatan Daerah berpengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat setelah Reformasi Keuangan Daerah.
2. Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap terbentuknya SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Malang. Maka terjadi perbedaaan terbentuknya SiLPA pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah dimana Belanja Daerah berpengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat setelah Reformasi Keuangan Daerah.
3. Kas dan Anggaran Kas Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap terbentuknya SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Malang. Maka terjadi perbedaaan terbentuknya SiLPA pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah dimana Kas dan Anggaran Kas berpengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat setelah Reformasi Keuangan Daerah.
4. Utang dan Investasi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap terbentuknya SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Malang. Maka terjadi perbedaaan terbentuknya SiLPA pada saat sebelum dan setelah Reformasi Keuangan Daerah dimana Pendapatan Daerah berpengaruh lebih tinggi terhadap terbentuknya SiLPA pada saat setelah Reformasi Keuangan Daerah.

Saran

Saran yang didapat dari penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya mengkaji secara cermat potensi-potensi daerah yang dapat menunjang Pendapatan Daerah. Sehingga, target pendapatan daerah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dalam sistem penargetan pendapatan daerah basisnya yaitu data base objek pendapatan, tidak berdasarkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, jadi realisasi pendapatan mendekati target. Caranya yaitu melalui program/kegiatan updating data yang berdasarkan penelitian dan literatur sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya menghimbau kepada Pemerintah Pusat untuk tidak terlambat memberikan dana transfer atau tidak mendekati akhir tahun anggaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seharusnya mengkaji lebih matang dalam menyusun anggaran belanja daerah, perencanaan awal atas usulan program/kegiatan dari SKPD. Hal yang perlu dilakukan yaitu adanya program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan penganggaran melalui bimtek, kursus, training dan kegiatan lainnya agar program/kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga tidak terjadi kesenjangan anggaran belanja yang terlalu jauh seperti terjadinya belanja yang melebihi atau dibawah dari target anggaran
4. Utang dimanfaatkan sebagai sumber investasi bagi Pemerintah Daerah karena Investasi daerah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

_____ .Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 115

_____ .Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

_____ .Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

_____ .Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____ .Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bali, Thomas Tuba., 2013. Tesis. Analisa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). MAKSI-UGM.Yogyakarta.

Gujarati, Damodar N. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku 1, edisi ke-5). Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar N. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika (Buku 2, edisi ke-5). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy., 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi http://syukriy.wordpress.com/2009/10/13/hubungan-dan-masalah-keagenan-di-pemerintah-daerah-sebuah-peluang-penelitian-anggaran-danakuntansi/ diakses 20 Desember 2014

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam., 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Halim, Abdul., 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Depkeu. 2006. Data Keuangan Daerah Sebelum Tahun Anggaran 2006 diakses tanggal 18 Januari 2015.

Depkeu. 2011. Publikasi APBD, Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diakses tanggal 20 Desember 2014.

Kementrian Dalam Negeri,. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007. Jakarta: Tim Redaksi Fokusmedia, Fokusmedia,.

Kuswoyo, Iwan Dwi., 2011. Tesis. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja Diakhir Tahun Anggaran : Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Magister Manajemen. UGM.

Pemerintah Kabupaten Malang. 2014. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 1998/1999 – 2013.

Mahmudi., 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo., 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____ 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratisation, Local Government, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi

_____ 2002a. Serial Otonomi Daerah, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Khusus, Yogyakarta: Penerbit Andi,

RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015. Arah Kebijakan APBD diakses 06 Maret 2015

Sugiyono., 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Usman., 2013. Tesis. Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa. Malang: Magister Ilmu Ekonomi UB.

Witri., 2010. Tesis. Analisa SiLPA pada Perhitungan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2009. Yogyakarta: MEP-UGM.